

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-I) dari mahasiswa:

Nama : Melda Citra Batiniah Loi

NPM : 20510093

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Nias Selatan.

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S-I)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Drs. Mangasa Sinurat, S.H., M.Si



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si., Ak

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliara Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak., C

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat merupakan salah satu tindakan dalam pemberian kewenangan terhadap pemerintahan daerah agar dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Dalam hal ini maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing untuk memajukan daerah tersebut. (Safitri dalam Ni Made Rika K.D, dkk 2014). Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara optimal (Defitri, 2018).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah penilaian terkait tingkat kesesuaian pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah setiap periode anggarannya. Kualitas LKPD dapat diketahui dari opini yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak pemeriksa dan penilai

LKPD. Audit terhadap LKPD dilaksanakan setiap periode oleh BPK guna memberikan pendapatnya mengenai level kewajaran informasi pada laporan tersebut (Widiatmoko, 2020).

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:**
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam

melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Menurut Putra & Halmawati, (2022) yang melakukan penelitian ini opini BPK merupakan pengukur kualitas laporan keuangan untuk daerah tertentu. Jadi semakin bagus kualitas laporannya maka opini audit yang tercipta adalah wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD, salah satunya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pmendagri No. 21 Tahun 2011).

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yg handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan dalam mengambil keputusan. Sedangkan masyarakat selalu menuntut pemerintah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem Pemda. Sehingga penerapan SAKD yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik yang dapat memberikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem Pemda (Mardiasmo 2004:35).

Faktor yang selanjutnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan atas LKPD belum mencapai harapan. Hal ini dilihat dari beberapa opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK yang masih memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atau opini Tidak Memberi Pendapat. Hal ini disebabkan karena Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki kelemahan, sehingga LKPD tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (Fahirah, 2022).

Perkembangan pendapat atas LKPD tahun 2017-2021 terdiri dari 34 LK Pemprov, 414 LK Pemkab, dan 93 LK Pemkot berdasarkan tingkat Pemda dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2017-2021
Sumber: IHPS I 2022 BPK RI

emerintaha	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	85%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%
2020	97%	3%	0%	0%	100%	88%	10.3%	1.2%	0.5%	100%	95%	5%	0%	0%	100%
2021	100%	0%	0%	0%	100%	91%	8.5%	0.5%	0%	100%	96%	3%	1%	0%	100%

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa ada beberapa opini yang menunjukkan WDP dan TMP pada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Yaitu pada tingkat Provinsi tahun 2017 mengalami penurunan opini WTP sebesar 3% dari 97% pada tahun 2017, menjadi 94% pada tahun 2018. Pada tingkat Kabupaten tahun 2019 terdapat temuan opini TW sebesar 0%, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.5%. Pada tingkat Kota, terdapat peningkatan temuan opini TMP sebesar 1%, yaitu 0% pada tahun 2020 dan 1% pada tahun 2021, hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas laporan keuangan dari tahun 2020-2021. Sama halnya data pada tahun 2021 masih menunjukkan adanya laporan keuangan yang belum mendapatkan WTP terutama ditingkat Kabupaten dan Kota. (BPK RI, 2022a).

Perkembangan pendapat atas LKPD tahun 2018-2020 pada wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020 pada Wilayah
Provinsi Sumatera Utara
Sumber: IHPD SUMUT TA 2021

No.	Entitas	Opini		
		TA 2018	TA 2019	TA 2020
1.	Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP
2.	Kabupaten Asahan	WTP	WTP	WTP
3.	Kabupaten Batu Bara	WTP	WTP	WTP
4.	Kabupaten Dairi	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Deli Serdang	WTP	WTP	WTP
6.	Kabupaten Humbang Hasundutan	WTP	WTP	WTP
7.	Kabupaten Karo	WDP	WTP	WTP
8.	Kabupaten Labuhanbatu	WDP	WDP	WDP
9.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	WTP	WTP	WTP
10.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	WDP	WTP	WTP
11.	Kabupaten Langkat	WDP	WTP	WTP
12.	Kabupaten Mandailing Natal	WDP	WDP	WDP
13.	Kabupaten Nias	WDP	WDP	WDP
14.	Kabupaten Nias Barat	TMP	WDP	WDP
15.	Kabupaten Nias Selatan	WDP	WDP	WDP
16.	Kabupaten Nias Utara	WDP	WDP	WDP
17.	Kabupaten Padang Lawas	WDP	WTP	WTP
18.	Kabupaten Padang Lawas Utara	WTP	WTP	WDP
19.	Kabupaten Pakpak Bharat	WDP	WDP	WTP
20.	Kabupaten Samosir	WTP	WTP	WTP

21.	Kabupaten Serdang Bedagai	WTP	WTP	WTP
22.	Kabupaten Simalungun	TMP	WDP	WDP
23.	Kabupaten Tapanuli Selatan	WTP	WTP	WTP
24.	Kabupaten Tapanuli Tengah	WDP	WDP	WTP
25.	Kabupaten Tapanuli Utara	WTP	WTP	WTP
26.	Kabupaten Toba Samosir	WTP	WTP	WTP
27.	Kota Binjai	WTP	WTP	WTP
28.	Kota Gunung Sitoli	WTP	WTP	WTP
29.	Kota Medan	WDP	WDP	WTP
30.	Kota Padangsidimpuan	WDP	WDP	WTP
31.	Kota Pematangsiantar	WDP	WDP	WDP
32.	Kota Sibolga	WTP	WTP	WTP
33.	Kota Tanjungbalai	TMP	WDP	WDP
34.	Kota Tebingtinggi	WTP	WTP	WTP

Hasil Pemeriksaan atas LKPD pada wilayah Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa 24 entitas memperoleh opini WTP dan 10 entitas memperoleh opini WDP.

Demikian pula Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nias Selatan yang diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara masih banyak yang memperoleh opini selain dari Opini WTP (BPK RI, 2022b). Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017-2021 tertera pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
 Daftar Opini BPK Untuk LKPD Kabupaten Nias Selatan
 Tahun 2017-2021
 Sumber: LHP LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kabupaten Nias Selatan
1	2017	TMP
2	2018	WDP
3	2019	WDP
4	2020	WDP
5	2021	WDP

Berkaitan dengan fenomena dan uraian tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, seperti yang dilakukan oleh Risdhayanti Nur Sholikah et al., 2016. Lia Hanifa et al., 2016. Gusrya Indria Sari dan Fadli, 2017. Tulus Harefa, 2014. Nyoman Ari Surya Darmawan et al., 2014. Annisa Rizky Lutfiyanti, 2018. Synthia (2017) dan Kevin Thenikusuma, Nathasya Monica Muis (2019). Pada hasil penelitian tersebut diketahui bahwa secara parsial maupun simultan, Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas LKPD. Penelitian mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah dilakukan oleh Siska Yulia Defitri (2018) dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan SAKD berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas LKPD.

Berdasarkan uraian tersebut, serta didukung oleh beberapa fakta-fakta yang ada, maka penulis meneliti lebih mendalam mengenai: **PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KAB. NIAS SELATAN.**

1.2. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD di Kab. Nias Selatan Periode Tahun 2022?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD di Kab. Nias Selatan Periode Tahun 2022?
3. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Daerah pada BPKPAD di Kab. Nias Selatan Periode Tahun 2022?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD di Kab. Nias Selatan Periode Tahun 2022
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD di Kab. Nias Selatan Periode Tahun 2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD di Kab. Nias Selatan Periode Tahun 2022.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, SAKD dan Kualitas LKPD pada sektor Publik dan Pemerintahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara teknis di lapangan dan dapat memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah secara nyata.

2. Bagi Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas LKPD Kab. Nias Selatan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi terbaru untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Nias Utara dalam mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

3.5.4. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bidang studi yang membahas mengenai Akuntansi Keuangan khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan.

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan, transaksi-transaksi dan kinerja suatu perusahaan (Lutfiyanti, 2018).

2.1.2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menurut (Mardiasmo, 2006: 32) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya (Heliyanda, 2018).

2.1.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

1. Relevan

Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang diharapkan dapat membantu para pengguna dalam mengevaluasi peristiwa saat ini ataupun masa lalu, memprediksi masa yang akan datang, dan mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Laporan keuangan tergolong relevan apabila memenuhi syarat-syarat utama, yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. . Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap formasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas ada kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi laporan keuangan yang andal atau dapat dipercaya memiliki arti bahwa informasi tersebut bebas dari pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta-fakta secara jujur, memiliki netralitas dan dapat diverifikasi. Dengan kata lain, informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah harus dapat diandalkan dan tidak memanipulasi para penggunanya. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang selanjutnya seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya, maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka APBD yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri, artinya semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik (Darma, 2019).

2.1.5. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Chabib sholeh (2010;10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai.

2. Value for money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep value for money, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran

Dalam mengelola keuangan publik Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsif terhadap

aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi temuan mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2.1.6. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 13, 2006).

2.1.7. Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu, *single entry*, *double entry*, *triple entry*.

1. *Single entry* : Sistem pencatatan *single entry*s sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

2. *Double entry* : Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan *double entry* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun berfungsi sebagai media pengecekan. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit.

3. *Triple entry* : Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah

daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat karena masing masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media cross check. Selain ketepatan dalam pencatatan transaksi, (*double entry*) juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.

2.1.8. Metode Basis Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina Rasdianto (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Akuntansi Berbasis Kas
2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua
3. Akuntansi Berbasis Akrua

Berikut penjelasan tentang basis akuntansi pemerintahan:

1) Akuntansi berbasis kas : Akuntansi berbasis kas merupakan akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

2) Akuntansi berbasis kas menuju akrual : Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005).

3) Akuntansi berbasis akrual : Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 18 Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa saat ini penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan sistem pencatatan dan metode pencatatan yang efektif akan menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal.

2.1.9. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa “Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri atas pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan.” Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Pencatatan
 - a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
 - b. Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
 - c. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - d. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
 - e. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya kedalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran
 - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
 - b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi paling up to date.
 - c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akun nol.
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- g. Sikap kedisiplinan dalam pembukuan keuangan.

3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya antara lain : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan Donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat.

2.1.10. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut (Mokoginta et al., 2021) Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset, dan disempurnakan oleh Permendagri menjadi 5 prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tangan, perubahan klasifikasi dan terhadap asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5. Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan

2.1.11. Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam definisi akuntansi terdapat kata “entitas”. Entitas adalah “satuan” yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi adalah organisasi perusahaan dan organisasi pemerintahan. Contoh organisasi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal sebagai dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam (2012:38) bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu:

1. Akuntansi Komersial

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

2. Akuntansi Pemerintahan

Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

3. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional, sebagai contoh adalah neraca pembayaran negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam dapat dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Nuryanti, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini tertera pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
-----	---	------------------------	-----------------	------------------

1	<p>Risdhayanti Nur Sholikah et al., 2016. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali)</p>	<p>Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah.</p>	<p>Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji F, Koefisien Determinasi</p>	<p>Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dipemerintah daerah Kabupaten Boyolali.</p>
---	--	---	--	---

2.	Lia Hanifa et al., 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Pengelola Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Berganda dengan SPSS Versi 22	Berdasarkan hasil penelitian, Kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Artinya semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3.	Gusrya Indria Sari dan Fadli, 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penerapan <i>Good Governance</i> , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Analisis Statistik Deskriptif, PLS <i>Algorithm</i> , Uji Hipotesis	Berdasarkan pada hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. San Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.	<p>Kartika Dwi Indrayani dan Harjanti Widiastuti, 2020.</p> <p>Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)</p>	<p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</p>	<p>Moderated Regression Analysis (MRA) dengan SPSS 15</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
5.	<p>Tulus Harefa, 2014.</p> <p>Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)</p>	<p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Analisis Deskriptif, Analisis Verifikatif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh dengan arah positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten dari Bandung.</p>
6.	<p>Nyoman Ari Surya Darmawan et al., 2014.</p> <p>Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10SKPD Berupa Dinas di</p>	<p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik Sedangkan Pengujian Hipotesis Dengan Analisis Regresi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah</p>

	Kabupaten Jembrana)		berganda	Daerah.
7.	Annisa Rizky Lutfiyanti, 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Deskriptif, Analisis Verifikatif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi, Korelasi, Pengujian Hipotesis Serta Analisis Koefisien Determinasi	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan secara simultan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 54,6%

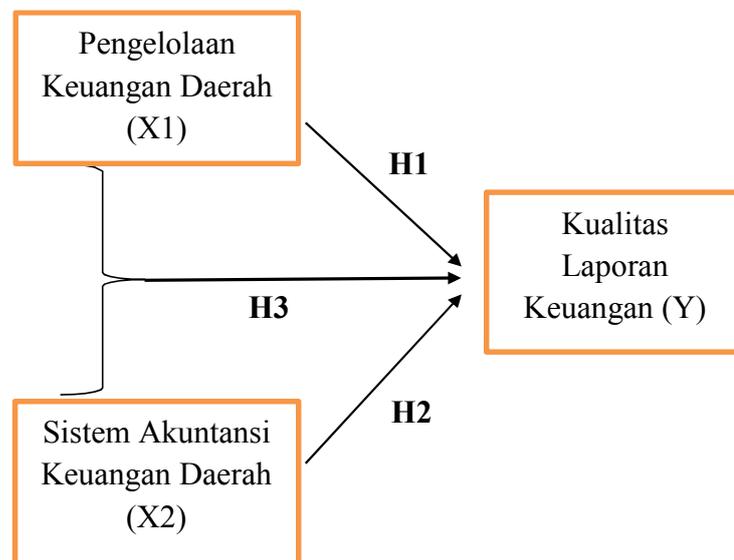
8.	Siska Yulia Defitri, 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.
9.	Synthia (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Synthia (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Statistik Deskriptif, PLS <i>Algorithm</i> , Uji Hipotesis	Penerapan kompetensi sumber daya manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan
10.	Kevin Thenikusuma, Nathasya Monica Muis (2019) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Deskriptif, Analisis Verifikatif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi, Korelasi, Pengujian Hipotesis Serta Analisis Koefisien Determinasi	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber: Data Sekunder (2023)

2.3 Kerangka Teoritis dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dan replika dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti, seperti pada Gambar 2.1



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

Sumber: Didisain Penulis

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*), telah mendorong pemerintah daerah untuk memberikan

pelayanan publik yang bermutu. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pemerintah dalam tanggungjawabnya terhadap publik adalah memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang memadai. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan yang baik dan kompeten (Nuryanti, 2022).

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel (Fahirah, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pasha, 2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

(Sholikhah et al., 2016) Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel

pengelolaan keuangan daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana) oleh Dewi, dkk, 2016. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Laporan keuangan digunakan bagi pihak yang berkepentingan dalam berbagai hal. Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Lutfiyanti, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Patra et al., 2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu. Dalam hal ini sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka

dari itu, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

(Sholikhah et al., 2016) Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. (Hanifa, 2016) Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, Kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan.

3. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai

dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaaan dana (Defitri, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hanifa, 2016). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Sholikhah et al., 2016) Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. (Dewi et al., 2016) Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD Kabupaten Nias Selatan.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD Kabupaten Nias Selatan.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKPAD Kabupaten Nias Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:206), pengertian analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausalitas, karena disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variable. (Hasanah, 2020) menyatakan bahwa metode verifikatif adalah adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan SAKD sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan yang menjadi variabel terikat (variabel dependen) adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu Aparat Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias Selatan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jl. Diponegoro, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada BPKPAD Kab. Nias Selatan yang berjumlah 110 orang. Margono (2007: 123) menyatakan bahwa penetapan besar-kecilnya sampel tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak, artinya tidak ada suatu ketentuan berapa persen suatu sampel harus diambil. Peneliti mengambil sampel sebesar 40,9% dari jumlah populasi sehingga berjumlah 45 orang.

Penarikan sampel menggunakan teknik *Simple random sampling*. *Simple random sampling* dilakukan dengan memilih anggota populasi secara acak untuk menjadi sampel tanpa memperhatikan strata yang ada. Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian. Cara undian meminimalkan ketidakadilan dalam memilih sampel karena pengambilan dilakukan secara acak.

3.4. Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa adanya media

perantara. Sedangkan Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Silaban, 2022).

Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung dengan cara membagikan kuesioner dalam format *link google form* untuk diisi oleh pegawai BPKPAD Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan Skala Likert. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari literatur seperti penelitian sebelumnya, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan suatu data penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti akan memperoleh data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditetapkannya (Sugiyono, 2016).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet (Fahirah, 2022). Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada responden dengan menggunakan *link google form*.

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut (Sugiyono, 2018) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan di pelajari sehingga menjadi variabel yang dapat di ukur. Definisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih

memudahkan dalam operasionalisasi dari sudut penelitian (Fahirah, 2022). Adapun Definisi Operasional, Indikator dan Pengukuran Variabel terdapat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Definisi Operasional, Indikator dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala	No Kuesioner
1	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.	Likert	1
			2. Keputusan pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.	Likert	2
		<i>Value for money</i> Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Pengelola keuangan dilaksanakan sesuai standar	Likert	3
			4. Dioperasionalkan secara ekonomis, efektif dan efisien.	Likert	4
		Kejujuran dalam mengelola keuangan publik	5. Memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja.	Likert	5
			6. Jujur dan dapat dipercaya.	Likert	6
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	7. Terbuka dalam pengelolaan keuangan.	Likert	7
			8. Responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.	Likert	8
		Pengendalian Pengelolaan	9. Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan.	Likert	9

		Keuangan Daerah	10. Setiap evaluasi kinerja ditindaklanjuti.	Likert	10
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1. Prosedur pencatatan transaksi sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum.	Likert	1
			2. Pencatatan yang digunakan efektif.	Likert	2
			3. Relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada.	Likert	3
			4. Dilaksanakan tanpa kesalahan atau penyimpangan.	Likert	4
			5. Menimbulkan dampak yang baik bagi instansi.	Likert	5
		Penggolongan dan Pengikhtisaran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	6. Dilakukan identifikasi/ pengklasifikasian.	Likert	6
			7. Penjurnalan dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah.	Likert	7
			8. Pengklasifikasian transaksi dilaksanakan secara tepat dan benar.	Likert	8
		Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	9. Dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya.	Likert	9
			10. Buku laporan yang dibuat sesuai prosedur yang berlaku.	Likert	10
			11. Buku laporan yang dibuat telah relevan.	Likert	11

			12. Dilaksanakan dengan benar tanpa penyimpangan.	Likert	12
3	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Relevan	1. Dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.	Likert	1
			2. Mampu memprediksi masa yang akan datang.	Likert	2
			3. Penerbitan laporan keuangan tepat waktu.	Likert	3
			4. Mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.	Likert	4
		Andal	5. Menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan lainnya.	Likert	5
			6. Mewujudkan simpulan yang berbeda.	Likert	6
			7. Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.	Likert	7
		Dapat Dibandingkan	8. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	Likert	8
			9. Dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.	Likert	9

		Dapat Dipahami	10. Informasi dapat dipahami dengan jelas.	Likert	10
			11. Disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna.	Likert	11

Sumber: (Fahirah, 2022).

3.6. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa analisis data adalah proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data mengenai demografi responden (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, posisi terakhir, pengalaman kerja, dan lain-lain) dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (tekanan anggaran waktu, kompensasi dan penalaran moral auditor serta dampaknya pada perilaku disfungsional auditor dan kualitas audit yang dihasilkan), peneliti menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi (Indria, 2018).

3.6.2. Uji Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dari penelitian ditentukan oleh instrumen-instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data agar dapat menghasilkan data yang berlaku (Indria, 2018). Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Correlated item-Total Correlation* dengan nilai r tabel, untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan $\alpha = 0,05$. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2019).

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid.

Apabila suatu alat ukur sudah dikatakan valid, maka untuk selanjutnya dapat dilanjutkan untuk melakukan pengujian reliabilitas. Untuk sebaliknya apabila alat ukur dinyatakan tidak valid, maka alat ukur yang sebelumnya harus dievaluasi atau harus diganti dengan alat ukur yang lebih tepat (Fahirah, 2022).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan indeks dalam mengetahui sejauh mana alat pengukuran yang memberikan suatu hasil yang konsisten. Apabila semakin kecil kesalahan dalam pengukuran, maka akan semakin reliabel alat pengukur. Besar kecil nya kesalahan pengukuran dapat diketahui dengan indeks korelasi.

Uji reliabilitas dapat digunakan dengan metode Cronbach's Alpha dengan kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika Cronbach's Alpha ≥ 0.60 maka alat ukur bersifat reliabel.
- b. Jika Cronbach's Alpha < 0.60 maka alat ukur bersifat tidak reliabel (Fahirah, 2022).

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam (Amriani, 2018) dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Untuk model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov Smirnov Test dengan menggunakan program SPSS. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan:

- a. Jika nilai signifikansinya $> \alpha = 0.05$ maka data normal
- b. Jika nilai signifikansinya $< \alpha = 0.05$ maka data tidak normal (Fahirah, 2022).

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi, maka hal tersebut dapat dinamakan problem multikolinieritas. Gejala adanya multikolinieritas dapat dideteksi dengan menggunakan pearson correlation dan tolerance value serta Variance Inflation Factor (VIF). Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- a. Jika $VIF > 10$ maka Hipotesis ditolak (adanya multikolinieritas)
- b. Jika $VIF < 10$ maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinieritas)
- c. Jika Tolerance > 0.10 maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinieritas)
- d. Jika Tolerance < 0.10 maka Hipotesis ditolak (ada multikolinieritas) (Fahirah, 2022).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Mengenai perolehan hasil dari uji heteroskedastisitas tersebut ditunjukkan dengan kriteria:

- a. Signifikansi (2-tailed) > 0.05 Tidak ada Heteroskedastisitas
- b. Signifikansi (2-tailed) < 0.05 Ada Heteroskedastisitas

Atau dapat juga diketahui dari gambar Scatterplot di mana titik-titik data harus menyebar, apabila membentuk pola menumpuk berarti terjadi heteroskedastisitas (Fahirah, 2022).

3.6.4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis adalah suatu pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan kasus tertentu serta merupakan suatu anggapan sementara yang perlu untuk diuji suatu kebenarannya dalam suatu penelitian (Fahirah, 2022).

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji Koefisien Regresi Parsial atau Uji t yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t regresi dengan table t sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Kriteria untuk pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka secara parsial berpengaruh signifikan
- b. $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ maka secara parsial berpengaruh secara signifikan
- c. $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan, atau
 - a. Signifikansi < 0.05 secara parsial berpengaruh secara signifikan
 - b. Signifikansi > 0.05 secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan

2. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji Koefisien Regresi secara Simultan atau Uji F yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikan atau $\alpha = 5\%$. pengambilan keputusan berdasarkan dari kriteria sebagai berikut:

- a. $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
- b. $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan, atau
 1. Signifikansi > 0.05 maka secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
 2. Signifikansi < 0.05 maka secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan.

3.6.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) yaitu dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai untuk koefisien determinasi yaitu mulai dari 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.